

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Definisi Sistem

Pengertian sistem tergantung pada latar belakang, cara pandang orang yang mencoba mendefinisikannya. Menurut hukum sistem dipandang sebagai kumpulan aturan-aturan yang membatasi baik oleh kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan tempat sistem itu berada, untuk menjamin keserasian dan keadilan. Schmidt dan Taylor (1970), mendefinisikan sistem sebagai kumpulan komponen-komponen (entiti-entiti) yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu tujuan akhir yang logis. Model didefinisikan sebagai suatu deskripsi logis tentang bagaimana sistem bekerja atau komponen-komponennya bereaksi. Dengan membuat model dari suatu sistem maka diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan analisis. (Arman Hakim Nasution, 2007).

3.2 Definisi Simulasi

Simulasi sebagai cara untuk menghasilkan kondisi dari situasi dengan model untuk studi menguji atau *training*, dan lain-lain. Khosnevis (1994), mendefinisikan simulasi sebagai pendekatan eksperimen. Simulasi juga merupakan kumpulan metode dan aplikasi yang digunakan untuk meniru perilaku suatu sistem, kadang dilakukan menggunakan komputer dengan *software* yang sesuai.

3.3 Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan adalah memilih di antara alternatif-alternatif untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan. Menurut Simon (1977), pengambilan keputusan manajerial itu identik dengan keseluruhan proses manajemen perencanaan melibatkan serangkaian keputusan : Apa yang harus dilakukan? Kapan? Bagaimana? Dimana? Oleh siapa? Oleh karena itu, perencanaan mengandung arti pengambilan keputusan. Fungsi lain dalam proses manajemen seperti mengatur dan mengobrol, juga melibatkan pembuat keputusan (Turban dkk,

2005). Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam rangka pemecahan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir guna dilaksanakan (Effendy, 1996).

3.4 Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*)

Pengertian sistem pendukung keputusan yang dikemukakan oleh Michael S Scott Morton dan Peter G W Keen, dalam buku Sistem Informasi Manajemen (McLeod, 1995) menyatakan bahwa sistem pendukung keputusan merupakan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah yang harus dibuat oleh manajer.

Menurut Raymond McLeod, Jr mendefinisikan sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem informasi yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah yang dihadapinya (McLeod, 1995). Definisi selengkapnya adalah sistem penghasil informasi spesifik yang ditujukan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer pada berbagai tingkatan. Definisi awal dari sebuah sistem pendukung keputusan diidentifikasi sebagai sistem yang dimaksudkan untuk mendukung pembuat keputusan manajerial dalam keputusan situasi semi terstruktur. Sistem pendukung keputusan dimaksudkan untuk membantu para pembuat keputusan dalam memperluas kemampuan mereka tetapi tidak untuk menggantikan keputusan mereka. Tersirat di awal definisi, adalah gagasan bahwa sistem akan berbasis komputer, akan beroperasi secara interaktif online, dan memiliki kemampuan *output* grafis (Turban dkk, 2005).

3.5 Tujuan Sistem Pendukung Keputusan

Menurut Keen dan Scott dalam buku Sistem Informasi Manajemen (McLeod, 1995) tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah :

- A. Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur.
- B. Mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya.
- C. Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan manajer dari pada efisisensinya.

3.6 Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Komponen dalam sistem pendukung keputusan dari beberapa subsistem, yaitu :

A. Subsistem manajemen data

Merupakan subsistem yang memasukan satu database yang berisi data yang relevan dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut DBMS. Subsistem manajemen data dapat diinterkoneksi dengan data warehouse perusahaan, suatu repository untuk data perusahaan yang relevan untuk pengambilan keputusan.

B. Subsistem manajemen model

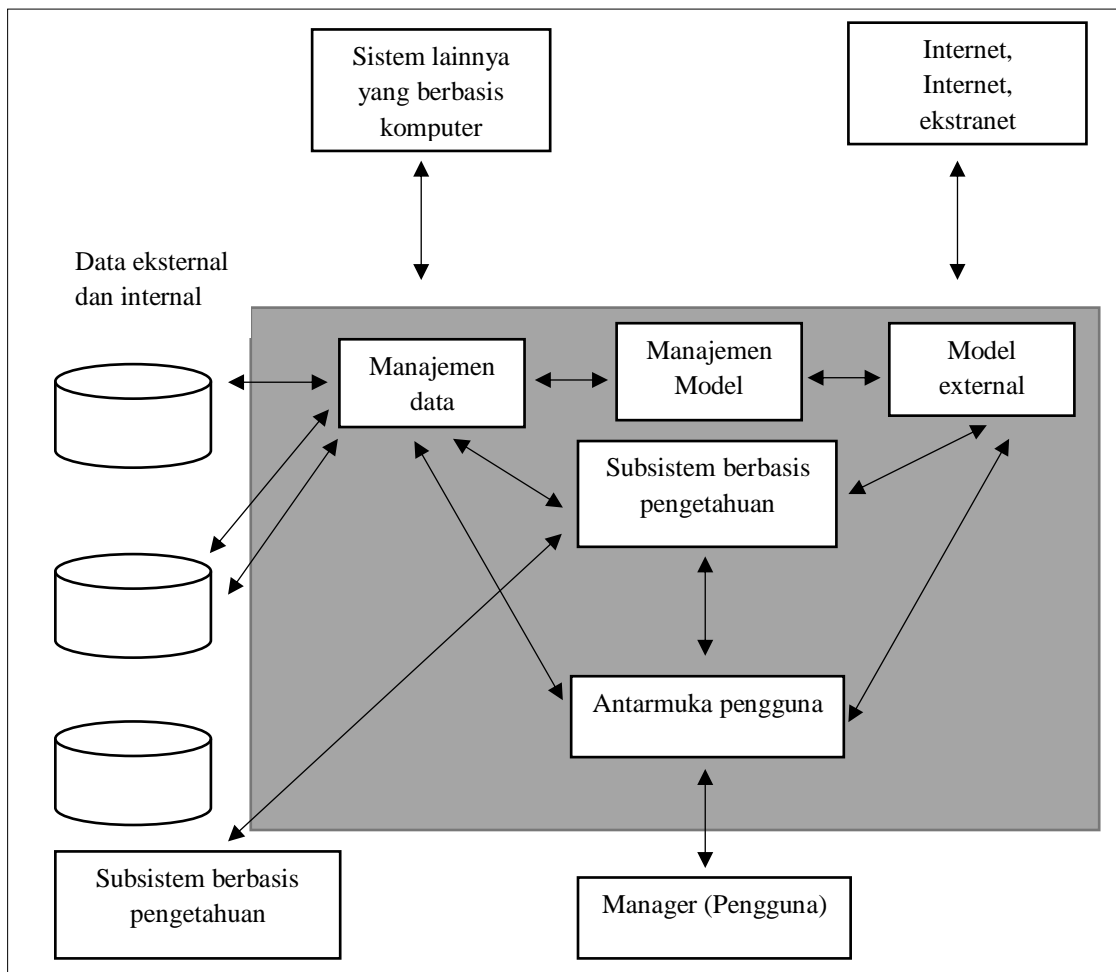
Merupakan paket perangkat lunak yang memasukan model keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif lainnya yang memberikan kapabilitas analitik dan manajemen perangkat lunak yang tepat. Perangkat lunak ini sering disebut sistem manajemen basis model (MDMS).

C. Subsistem antarmuka pengguna

Pengguna berkomunikasi dan memerintahkan DSS melalui subsistem ini. Pengguna adalah bagian yang dipertimbangkan dari sistem.

D. Subsistem manajemen knowledge

Subsistem ini dapat mendukung keputusan subsistem lain dan bertindak sebagai suatu komponen independent. Ia memberikan intelegensi untuk memperbesar pengetahuan si pengambil keputusan. Berikut adalah skematik dari sistem pendukung keputusan dan komponennya.



Gambar 3.1 Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Alur atau proses pemilihan alternatif tindakan atau keputusan biasanya terdiri dari langkah-langkah berikut :

A. Tahap Penelusuran (*Intelligence Phase*)

Suatu tahap proses seseorang dalam rangka mengambil keputusan untuk permasalahan yang dihadapi, terdiri dari aktivitas penelusuran, pendeteksian serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah.

B. Tahap Perancangan (*Design Phase*)

Tahap proses pengambil keputusan setelah tahap *intelligence* meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi. Aktivitas yang biasanya dilakukan seperti menemukan,

mengembangkan dan menganalisa tindakan alternatif yang dapat dilakukan.

C. Tahap Pilihan (*Choice Phase*)

Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan diantara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan.

D. Tahap Implementasi (*Implementation Phase*)

Pada tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan-perbaikan.

3.7 Basis Data Sistem Pendukung Keputusan

Subsistem data merupakan bagian yang menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh *Database Management Subsystem (DBMS)*. *DBMS* sendiri merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data. Data-data yang merupakan dalam suatu Sistem Penunjang Keputusan dapat berasal dari luar lingkaran. Keputusan pada manajemen *level* atas seringkali harus memanfaatkan data dan informasi yang bersumber dari luar perusahaan. Data dalam basis data disimpan dengan *minimum redundancy* untuk melayani banyak aplikasi. Kemampuan subsistem data yang diperlukan dalam suatu Sistem Pendukung Keputusan, antara lain :

- A. Mampu mengkombinasikan sumber-sumber data yang relevan melalui proses ekstraksi data.
- B. Mampu menambah dan menghapus secara cepat dan mudah.
- C. Mampu menangani data personal dan non resmi, sehingga user dapat bereksperimen dengan berbagai alternatif keputusan.
- D. Mampu mengolah data yang bervariasi dengan fungsi manajemen data yang luas.

3.8 Sistem Manajemen Model

Subsistem model dalam Sistem Penunjang Keputusan memungkinkan pengambil keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan alternatif solusi. Intergrasi model-model dalam Sistem Informasi Manajemen yang berdasarkan integrasi data-data dari lapangan menjadi suatu Sistem Pendukung Keputusan. Kemampuan subsistem model dalam Sistem Pendukung Keputusan antara lain :

- A. Mampu menciptakan model-model baru dengan cepat dan mudah.
- B. Mampu mengkatalogkan dan mengelola model untuk mendukung semua tingkat pemakai.
- C. Mampu menghubungkan model-model dengan basis data melalui hubungan yang sesuai.
- D. Mampu mengelola basis model dengan fungsi manajemen yang analog dengan database manajemen.

3.9 Subsistem Dialog

Subsistem dialog merupakan bagian dari Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan representasi dan kontrol mekanisme selama proses analisa dalam Sistem Pendukung Keputusan ditentukan dari kemampuan berinteraksi antara sistem yang terpasang dengan *user*. Pemakai terminal dan sistem perangkat lunak merupakan komponen-komponen yang terlibat dalam subsistem dialog yang mewujudkan komunikasi antara user dengan sistem tersebut. Komponen dialog menampilkan keluaran sistem bagi pemakai dan menerima masukan dari pemakai ke dalam Sistem Pendukung Keputusan. Adapun subsistem dialog dibagi menjadi tiga, antara lain :

A. Bahasa Aksi (*The Action Language*)

Merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan *user* dalam usaha untuk membangun komunikasi dengan sistem. Tindakan yang dilakukan oleh *user* untuk menjalankan dan mengontrol sistem tersebut tergantung rancangan sistem yang ada.

B. Bahasa Tampilan (*The Display or Presentation Language*)

Merupakan keluaran yang dihasilkan oleh suatu Sistem Pendukung Keputusan dalam bentuk tampilan-tampilan akan memudahkan *user* untuk mengetahui keluaran sistem terhadap masukan-masukan yang telah dilakukan.

C. Bahasa Pengetahuan (*Knowledge Base Language*)

Meliputi pengetahuan yang harus dimiliki *user* tentang keputusan dan tentang prosedur pemakaian Sistem Pendukung Keputusan agar sistem dapat digunakan secara efektif. Pemahaman *user* terhadap permasalahan yang dihadapi dilakukan diluar sistem, sebelum *user* menggunakan sistem untuk mengambil keputusan.

3.10 Metode Kuota Hare (*Hare Quota*)

Sesuai dengan namanya *Hare Quota*, metode ini dirumuskan oleh Sir Thomas Hare (1806-1891), seorang ahli hukum Inggris Raya, yang pada masa kehidupannya tertarik untuk melakukan reformasi terhadap sistem pemilu di negaranya. Metode ini dirumuskannya dengan maksud untuk menciptakan sistem pemilihan yang dapat menciptakan hasil yang proporsional bagi setiap kalangan. Metode *Hare Quota* ini diterapkan disejumlah negara seperti Austria, Filipina, Meksiko, Italia, Korea Selatan dan beberapa negara di kawasan Afrika.

3.10.1 Kelebihan Metode Kuota Hare (*Hare Quota*)

Kelebihan dari metode *Hare Quota* ini adalah metode yang sangat ramah terhadap partai besar dan menengah dengan tingkat disproporsionalitas suara cenderung rendah akan tetapi tidak memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap sistem kepartaian yang terbentuk.

3.10.2 Kekurangan Metode Kuota Hare (*Hare Quota*)

Kekurangan dari metode ini adalah bisa dibbilang pembagian kursi tidak adil karena jumlah suara tersebut beda jauh tetapi sama-sama mendapatkan satu porsi kursi, karena setelah dibagi sisa suara diambil kembali dan diurutkan berdasarkan *rangking* jumlah suara terbanyak.

3.10.3 Contoh Perhitungan Metode Kuota Hare (*Hare Quota*)

Cara menghitung perolehan kursi adalah dengan cara menentukan angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) DPRD provinsi dan BPP DPRD kabupaten/kota yaitu jumlah suara sah seluruh parpol peserta pemilu dibagi jumlah kursi di dapil tersebut :

$$BPP = \frac{totalvotes}{seats}$$

Perhitungan perolehan kursi parpol di setiap dapil menurut UU 8/2012 dilakukan dalam dua tahap.

Pada tahap tahap pertama, perhitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah setiap parpol dengan angka BPP. Ada kemungkinan parpol mendapatkan satu kursi (atau lebih) atau justru tidak memperoleh kursi pada tahap pertama ini. Ada tiga ketentuan penghitungan kursi pada tahap pertama, yaitu:

- A. Apabila suara sah suatu parpol sama jumlahnya atau lebih besar dibandingkan dengan BPP, parpol tersebut otomatis memperoleh kursi. Misalkan suatu partai A mendapatkan suara 300 ribu dan angka BPP-nya 142.857 suara, maka partai tersebut mendapatkan 2 kursi pada tahapan pertama. Apabila partai B mendapatkan 142.857 suara, otomatis suaranya sama dengan BPP. Partai tersebut dapat 1 kursi. Pada penghitungan tahap pertama partai A masih ada sisa suara dan partai B tidak ada sisa suara.
- B. Apabila dalam penghitungan tahap pertama masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua. Misalkan suatu partai A mendapatkan suara 300 ribu dan angka BPP-nya 142.857 suara, maka partai tersebut mendapatkan 2 kursi pada tahapan pertama. Sisa suaranya: 300 ribu dikurangi dengan 142.857 suara X 2 kursi = 14.286 suara. Sisa suara nanti dihitung dalam penghitungan tahap kedua. Sisa suara partai pada tahap pertama ini tidak hilang. Nanti sisa suara dibandingkan jumlahnya dengan suara sah partai lain yang tidak mendapatkan kursi atau sisa suara partai yang sudah mendapatkan kursi.

- C. Apabila suara sah suatu parpol tidak mencapai BPP pada tahap pertama, maka parpol tidak memperoleh kursi. Tapi ada kemungkinan dapat kursi pada tahap kedua, karena jumlah suara sahnya masih dihitung sebagai “sisa suara”. Misalkan pada penghitungan tahap pertama partai B memperoleh 100 ribu maka tidak mencapai BPP 142.857 suara. Suara 100 ribu adalah “sisa suara” yang dihitung untuk tahap kedua.

Sedangkan pada tahap kedua, dilakukan manakala masih terdapat sisa kursi dalam penghitungan tahap pertama diatas. Apabila pada tahap pertama kursi sudah habis dengan beberapa partai telah memenuhi atau lebih dari angka BPP, maka tidak ada penghitungan tahap kedua. Penghitungan tahap kedua dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada parpol peserta pemilu satu demi satu sampai habis kepada parpol berdasarkan “sisa suara” terbanyak. Yang dimaksud parpol masih terdapat “sisa suara” pada penghitungan tahap pertama apabila :

- A. Parpol yang mendapatkan sejumlah kursi pada tahap pertama kemungkinan ada “sisa suara” (jika jumlah suara sah parpol melebihi angka BPP). Contoh misalkan Partai A mendapatkan suara 300 ribu dan angka BPP-nya 142.857 suara. Dengan jumlah suara 300 ribu maka partai A mendapat 2 kursi pada tahap pertama. Sisa suaranya dihitung dengan jumlah 300 ribu dikurangi 285.714 suara (2 kursi) menjadi = 14.286 suara.
- B. Parpol yang tidak mencapai angka BPP (otomatis tidak dapat kursi) pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah parpol tersebut yang belum dihitung dianggap “sisa suara” yang akan diperhitungkan peringkatnya terhadap parpol lain. Misalkan Partai A memperoleh 300 ribu suara (tahap pertama dapat 2 kursi). Sisa suara = 14.286 suara. Partai B memperoleh 100 ribu suara (tahap pertama tidak dapat kursi). Suara belum dihitung = 100 ribu (sisa suara). Partai C (tahap pertama tidak dapat kursi). Suara belum dihitung = 110 ribu (sisa suara). Partai D (tahap pertama tidak dapat kursi). Suara belum dihitung = 90 ribu (sisa suara).

Partai E (tahap pertama tidak dapat kursi). Suara belum dihitung = 10 ribu (sisa suara). Partai F (tahap pertama tidak dapat kursi). Suara belum dihitung = 60 ribu (sisa suara). Partai G (tahap pertama tidak dapat kursi). Suara belum dihitung = 112 ribu (sisa suara). Dari contoh tersebut, maka pada tahap pertama hanya 1 partai yang dapat kursi yaitu partai A dengan memperoleh 2 kursi. Dengan masih adanya sisa 5 kursi belum terbagi pada tahap pertama (Semisal Dapil Jatim X dialokasikan 7 kursi), maka kursi tersebut berturut-turut diberikan kepada Partai G = 112 ribu (1 kursi), Partai C = 110 ribu (1 kursi), Partai B = 100 ribu (1 kursi), Partai D = 90 ribu (1 kursi), Partai F 60 ribu (1 kursi).

Sehingga dengan demikian, partai A mendapatkan 2 kursi pada tahap pertama, sedangkan pada tahap kedua tidak dapat kursi karena suaranya peringkat keenam. Adapun partai C, partai B, partai D, dan partai F, masing-masing memperoleh 1 kursi pada penghitungan tahap kedua, sedangkan di tahap pertama tidak dapat kursi.

Dalam hal terjadi suara sah atau sisa suara yang sama dalam penghitungan tahap kedua, PKPU 29/2013 telah memberikan jalan keluar, yaitu: parpol yang memiliki sisa suara yang lebih banyak persebarannya di dapil yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir. Parpol dikatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Sebagai perbandingan, pada pemilu DPRD provinsi pada 2014 lalu, yaitu setelah menetapkan angka BPP, kemudian perolehan kursi parpol untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dengan angka BPP DPRD di dapil masing-masing. Dalam hal masih terdapat “sisa kursi” setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi parpol peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan “sisa suara” terbanyak satu persatu sampai habis.

Dibawah ini adalah contoh tabel perhitungan suara dengan metode *Hare Quota* dan alokasi kursi sebanyak lima kursi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Contoh Perhitungan Metode *Hare Quota*

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Perhitungan Tahap I		
			Perolehan Kursi Tahap I	Sisa Kursi	Sisa Suara Tahap I
1	Partai A	155.000	0	2	155.000
2	Partai B	220.000	1		25.000
3	Partai C	210.000	1		15.000
4	Partai D	230.000	1		35.000
5	Partai E	160.000	0		160.000
BPP		195.000			

No.	Nama Partai	Perhitungan Tahap II		Jumlah Akhir Perolehan Kursi
		Ranking Suara Terbesar	Perolehan Kursi Tahap II	
1	Partai A	2	1	1
2	Partai B	4	0	1
3	Partai C	5	0	1
4	Partai D	3	0	1
5	Partai E	1	1	1
Jumlah Alokasi Kursi				5

Tabel diatas adalah contoh perhitungan penentuan pembagian kursi menggunakan metode *Hare Quota* dengan alokasi lima kursi dan lima partai. Jadi hasil perhitungan tahap pertama, dimenangkan oleh Partai B, Partai C, dan Partai D. Karena partai tersebut memperoleh jumlah suara diatas Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan jumlah kursi yang sudah diambil oleh partai-partai tersebut adalah tiga kursi.

Sedangkan tahap kedua dengan sisa dua kursi dimenangkan oleh Partai E, dan Partai A. Karena sisa kursi tersebut di urutan menurut jumlah sisa suara paling besar dari partai tersebut.

3.11 Metode *Sainte Lague*

Metode *Sainte Lague*, (pengucapan bahasa Prancis: [set.la.gy]), adalah metode dengan harga kursi tertinggi untuk mengalokasikan kursi dalam representasi proporsional daftar partai yang digunakan dalam banyak sistem pemungutan suara. Hal ini dinamai di Eropa setelah matematikawan Prancis André Sainte-Laguë dan di Amerika Serikat setelah negarawan dan senator Daniel Webster.

Sainte Lague pertama kali digunakan pada tahun 1832 dan 1842, metode ini diadopsi untuk alokasi kursi proporsional di bagian kongres Amerika Serikat (*Act of June 25, 1842, ch 46, 5 Stat. 491*). Lalu diperkenalkan kembali di Prancis oleh, André Sainte-Laguë dalam artikelnya pada tahun 1910. Tampaknya literatur Prancis dan Eropa tidak mengenal metode ini sampai setelah Perang Dunia II.

3.11.1 Kelebihan Metode *Sainte Lague*

Kelebihan Metode *Sainte Lague*, metode ini dihitung dengan cara membagi jumlah suara untuk masing-masing pihak dengan angka ganjil (1, 3, 5, 7, dst.). Sistem ini tidak inheren mendukung pihak yang lebih besar atau lebih kecil dan dengan demikian dapat dianggap “lebih proporsional”. *Sainte Lague* ini bersifat netral, artinya metode ini dalam melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar. Dengan demikian, jika menggunakan penghitungan suara melalui metode ini tentu akan menguntungkan partai kecil. Partai kecil hanya tidak memiliki suara mayoritas, akan tetapi suara minoritas partai kecil pada akhirnya tetap akan mendapatkan kursi. Namun, terkadang metode *Sainte Lague* dapat dimodifikasi dengan meningkatkan pembagi pertama misalnya 1,4 untuk mencegah “terlalu murah” partai kecil dengan suara minoritas terendah untuk memperoleh kursi. Metode *Sainte Lague* termasuk metode penghitungan yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan oleh metode penghitungan ini menyediakan cara

perhitungan perolehan suara kursi partai yang sederhana dan berlangsung dalam satu tahap perhitungan. Metode ini bisa menghilangkan munculnya potensi adanya sisa kursi yang tidak terbagi habis dalam satu kali tahap perhitungan seperti yang muncul dalam metode *Hare Quota*.

3.11.2 Kekurangan Metode *Sainte Lague*

Kekurangan Metode *Sainte Lague*, jika demikian adanya dalam pemilu, akan memunculkan banyak partai-partai baru yang akan ikut mencalonkan diri. Partai baru disini dapat dikatakan sebagai partai kecil. Partai-partai baru disini dikhawatirkan hanya akan mengambil keuntungan untuk memperoleh kedudukan karena mereka mempunyai kesempatan yang besar untuk mendapatkan kursi. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan kinerja dan kontribusi yang baik dalam menjalankan tugasnya kelak.

3.11.3 Contoh Perhitungan Metode *Sainte Lague*

Metode *Sainte Lague*, pembagiannya bukan alokasi kursi tetapi perolehan suara terbanyak dibagi bilangan ganjil berurutan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dst. Untuk urutan masing-masing kursi, rumus dari metode ini yaitu :

$$quot = \frac{vote}{2s + 1}$$

Dibawah ini adalah contoh tabel perhitungan suara dengan metode *Sainte Lague* dan alokasi kursi sebanyak lima kursi sebagai berikut :

Tabel 3.2 Contoh Perhitungan Metode *Sainte Lague*

No.	Nama Partai	Suara Sah	Putaran (1 kursi per putaran) / Total 5 putaran				
			1	2	3	4	5
1	Partai A	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Divisor Putaran		1	1	1	1	1

2	Partai B	220.000	220.000	220.000	73.333	73.333	73.333
	Divisor Putaran		1	1	3	3	3
3	Partai C	210.000	210.000	210.000	210.000	70.000	70.000
	Divisor Putaran		1	1	1	3	3
4	Partai D	230.000	230.000	76.666	76.666	76.666	76.666
	Divisor Putaran		1	3	3	3	3
5	Partai E	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	53.333
	Divisor Putaran		1	1	1	1	3
Suara Terbesar			230.000	220.000	210.000	160.000	155.000
Perolehan Kursi			Partai D	Partai B	Partai C	Partai E	Partai A

Tabel diatas adalah contoh perhitungan penentuan pembagian kursi menggunakan metode *Sainte Lague* dengan alokasi lima kursi dan lima partai. Perhitungan untuk pembagian kursi dengan metode ini adalah lima kursi dibandingkan berdasarkan jumlah suara yang didapat oleh masing-masing partai, lalu setiap babak dibagi dengan divisor seperti yang ada pada tabel, jika ditemukan jumlah suara paling tinggi, maka partai tersebut mendapatkan kursi pada babak pertandingan jumlah suara tersebut. Partai D memenangkan kursi pertama karena mendapatkan jumlah suara sebanyak 230.000 suara, diposisi kursi kedua dimenangkan oleh Partai B dengan perolehan suara 220.000 suara, diposisi kursi ketiga dimenangkan oleh Partai C dengan perolehan suara 210.000 suara, diposisi keempat dimenangkan oleh Partai E dengan perolehan suara 160.000 suara, dan diposisi kelima dimenangkan oleh Partai A dengan perolehan suara 155.000 suara. Jika alokasi kursi lebih banyak dari pada contoh diatas, maka jumlah putarannya pun juga sama dengan jumlah alokasi kursi. Suara partai terbesar otomatis menang

dalam putaran pertama, karena divisor putaran pertama hanya di bagi dengan angka satu. Jika pada putaran pertama partai tersebut telah mendapatkan kursi maka di putaran kedua, jumlah suara partai akan dibagi dengan angka tiga sampai jumlah putaran alokasi kursi itu habis.

“Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan”